**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAPKINERJA PEMERINTAH DAERAH**
**(Survey Pada SKPD Kota Cimahi)**

**Melisa rerung pali**

**Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia**

***Abstract***

*This research was conducted in Local Government on Cimahi city. The phenomenon that occurs is the performance of Local Government Cimahi rated not shown satisfactory results. This is due to the low budget absorption resulting from lazy local governments to use the money that has been transferred the central government to local governments*

*The method used in this research, descriptive and verification method. Statistical test used is to design the structural model, designing a measurement model, construct the path diagram, the test model fit. Suitability test structural models and hypotheses using SmartPLS software v.3.2.4.*

*The results of this study indicate Performance-Based Budgeting and Internal Control positive significant effect on the performance of local government at the Department of Cimahi.*

***Keywords**: Performance-Based Budgeting, Internal Control, and Performance Local government.*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara mempunyai suatu pemerintahan yang berfungsi sebagai kesatuan organisasi. Pemerintahan pusat maupun Pemerintahan daerah mengemban amanat untuk menjalankan tugas Pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan Pemerintahan. Pemerintah memungut berbagai macam jenis pendapatan dari rakyat yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada rakyat, pelaksanaan pembangunan, dan banyak kegiatan yang harus dilaksanakan (Wawan dan Lia,2009). *Local government* (pemerintah daerah/lokal) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus pula diiringi dengan prinsip *good governance*. *Good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik *(public good and services*). Prinsip-prinsip *good governance* antara lain adalah prinsip efektifitas *(effectiveness*), keadilan *(equity)*, partisipasi *(participation)*, akuntabilitas *(accountability)*, dan transparansi *(transparency)* (Basri, 2007:46). Kinerja adalah Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. (Mohamad Mahsun, 2013:25)

Dalam mewujudkan kinerja pemerintah yang memuaskan berupa tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance), pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

Negara/Daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi Negara secara menyeluruh (LAN, 2000). Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dengan menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan Negara/Daerah (Abdul Rohman, 2009).

Faktor kunci untuk mencapai keberhasilan dan meminimalkan permasalahan-permasalahan operasional adalah menyelenggarakan suatu sistem pengendalian manajemen atau yang juga sering disebut sebagai sistem pengendalian intern, yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh untuk peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Rahmadi Murwanto,2012:180).

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijadikan oleh dewan komisaris manajemen, dan personal lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: 1. Keandalan informasi keuangan 2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 3. Efektivitas dan efisien operasi" (Mulyadi, 2002). Pengendalian Intern dalam penerapannya harus senantiasa memperhatikan norma keadilan dan kepatuhan serta mempertimbangkan ukuran kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah (Mulyani, 2011).

Manajemen pemerintah daerah, dituntut untuk membangun instrument informasi keuangan yang memadai dan andal agar dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan yang rasional dalam mekanisme perencanaan dan pengendalian. Informasi keuangan tersebut tidak saja diperlukan untuk keperluan manajemen (intern) pemda, melainkan juga untuk memenuhi keperluan pihak luar (ekstern) pemda dalam rangka pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja (Abdul Rohman, 2009).

Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif dalam bentuk moneter maupun nonmoneter yang digunakan untuk menerjemahkan tujuan dan strategi perusahaan dalam satuan operasi". Oleh karena pentingnya anggaran dalam suatu perusahaan, dibutuhkan penyusunan anggaran yang baik. Anggaran yang disusun hendaknya dapat mengakomodir kepentingan setiap departemen yang terkait dalam pelaksanaanya. Untuk itu diperlukan partisipasi dalam penyusunan anggaran oleh berbagai pihak. Baik dari manajemen tingkat atas *(toplevel management)* maupun manajemen tingkat bawah *(lower level management*). Pihak-pihak inilah yang akan memainkan peranan penting dalam mempersiapkan dan mengevaluasi berbagai alternatif dari partisipasi dalam proses penyusunan anggaran" (Hansen dan Mowen, 2004:345)

Anggaran dibuat oleh kepala daerah melalui usulan dari unit-unit kerja yang disampaikan kepada kepala bagian dan diusulkan kepada kepala daerah, dan bersama-sama DPRD menetapkan anggaran yang dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Unit satuan kerja dipandang memiliki peranan utama dalam oprasional roda pemerintahan didaerah, karena unit satuan kerja merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban pemerintah daerah dan relatif lebih banyak melaksanakan tugas operasional pemerintahan dan lebih banyak mengkomsumsi sumber daya, yang tentunya harus diperuntukkan dan dipertanggungjawabkan pada kepentingan publik (Wawan Sukmawan dan Lia Anggarsari:2009).

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:86) "Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran, yaitu *top-down* (pendekatan dari atas ke bawah), *bottom-up* (pendekatan dari bawah ke atas) dan pendekatan lain yang merupakan gabungan dari kedua pendekatan tersebut, yaitu pendekatan partisipasi". Inti dari partisipasi dalam penyusunan anggaran adalah diperlukan kerjasama antara seluruh tingkatan organisasi. Manajer puncak biasanya kurang mengetahui bagian sehari-hari, sehingga harus mengandalkan informasi anggaran yang lebih rinci dari bawahannya. Dari sisi lain, manajer puncak mempunyai wawasan yang lebih luas atas perusahaan secara umum. "Setiap tingkatan tanggung jawab dalam suatu organisasi harus memberikan masukan terbaik sesuai dengan bidangnya dalam suatu sistem kerjasama penyusunan anggaran (Garrison dan Noreen, 2000:409).

**1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di dapat maka penulis dapat menuliskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah pada daerah Kota Cimahi.
2. Seberapa besar pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah pada daerah Kota Cimahi.

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dan Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan mengumpulkan data yang akurat dan relevan dengan uji empiris, guna memecahkan masalah.

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Cimahi.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Kegunaaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi mengenai pengendalian intern, partisipasi penyusunan anggaran, dan kinerja pemerintah daerah Kegunaan praktis penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Instansi
   Sebagai bahan pemikiran bagi Inspektorat untuk dapat mengetahui pengaruh signifikan dari pengendalian intern dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas Kota Bandung sehingga dapat melakukan perbaikan-perbaikan.
2. Bagi Pihak Lain
   Sebagai informasi, bahanrujukan dan referensi bagi pengembangan konsep tentang bagaimana pengaruh pengendalian intern, partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah

### 1.4.2 Kegunaaan Akademis

1. Bagi pengembang ilmu akuntansi sektor publik
   Dapat menambah pengetahuan dan memberikan referensi ilmiah khususnya akuntansi sektor publik mengenai pengaruh pengendalian intern dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah dengan membuktikan teori serta hasil penelitian terdahulu.
2. Bagi peneliti
   Dapat meningkatkan atau memperdalam pengetahuan dan pemahaman serta memecahkan masalah yang diangkat penulis mengenai pengendalian intern dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini juga berguna untuk sebagai bahan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Komputer (UNIKOM) Indonesia Bandung.
3. Bagi peneliti lain
   Diharapkan dapat memberikanpengetahuan dan informasi atau referensi yang diperlukan untuk pengembangan pengetahuan lebih lanjut mengenai pengendalian intern dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah.

## II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

### 2.1 Kajian Pustaka

**1. Anggaran Berbasis Kinerja**

Menurut Indra Bastian (2012:171) adalah Sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi.

**2. Pengendalian Internal**

Rahmadi Murwanto (2012:195) menjelaskan Pengendalian intern merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi, pengendalian intern juga terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja.

**3. Kinerja Pemerintah Daerah**

Menurut Chabib Soleh dan Suripto (2011:3) Pengertian Kinerja adalah Gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (strategic planning) suatu organisasi.

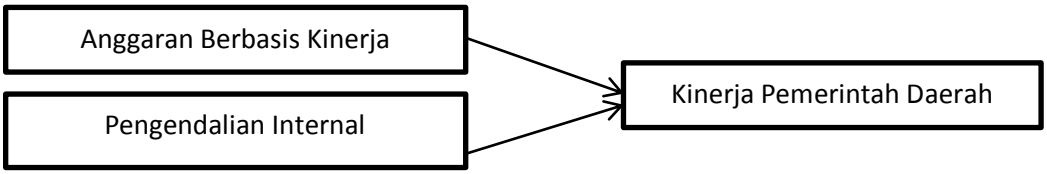
### 2.2 Kerangka Pemikiran

**1. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Indra Bastian (2012:54) mengungkapkan bahwa Penerapan anggaran berbasis kinerja dapat diukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah. Agar terciptanya kinerja yang baik dalam penerapan anggaran tersebut maka diperlukannya penerapan anggaran berbasis kinerja yang baik melalui beberapa faktor pendukung. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Komang Sri Endrayani, dkk (2014) menyatakan bahwa Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja untuk mendukung terciptanya kinerja yang baik pada instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan otonomi dan desentralisasi dalam organisasi sektor publik harus memenuhi beberapa dimensi. Dimensi-dimensi tersebut sangat berpengaruh terhadap suatu anggaran berbasis kinerja karena jika dalam melaksanakan anggaran berbasis kinerja dengan menaati dimensi tersebut, maka instansi pemerintah akan mampu menghasilkan kinerja secara optimal yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

**2. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Menurut Rahmadi Murwanto (2012:195) Pengendalian intern merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi. Pengendalian intern terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja. Pengendalian intern juga berperan sebagai perlindungan di garis depan dalam menjaga aset/harta dan mencegah serta mendeteksi kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan. Pengendalian intern membantu manajemen instansi pemerintah dalam mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik agar dapat meningkatkan kinerja pemerintah yang lebih baik dan optimal.




**Gambar 2.1 Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis

Dari kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengemukakan suatu hipotesis sebagai berikut:

$H_1$ : Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

$H_2$ : Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah

## III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

### 3.1 Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian perlu adanya desain penelitian, agar penelitian yang dilakukan lebih teratur dan sistematis. Dengan membuat desain penelitian, penyusunan sebuah karya tulis pun akan dapat terselesaikan dengan cepat dan baik. Desain penelitian menurut Husein Umar adalah sebagai berikut : "Desain penelitian adalah semua proses yang dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian" Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desain penelitian merupakan suatu cara bagi penulis untuk dapat melakukan penelitian secara baik dan sistematis. Oleh karena itu, membuat desain penelitian sangat penting agar pembuatan sebuah karya tulis dapat terselesaikan secara cepat dan baik. Dari penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa desain penelitian merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu. Menurut Sugiono terdapat enam aspek utama didalam proses penelitian yaitu:

1. Rumusan Masalah
2. Landasan Teori
3. Perumusan hipotesis
4. Pengumpulan data
5. Analisis data
6. Kesimpulan dan saran.

Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan, dengan pertanyaan ini maka akan dapat membantu peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas Kota Bandung
2. Seberapa besar pengaruh penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas Kota Bandung

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Teori dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab semua rumusan masalah penelitian tersebut. Landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian ini mempunyai dasar yang kuat bukan sekedar perbuatan coba – coba. Adanya landasan teori ini merupakan ciri bahwa penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Karena itu dalam penelitian ini, penulis memasukkan teori – teori yang berhubungan dengan judul yang diambil.

Jawaban terhadap rumusan masalah yang berdasarkan pada teori dan didukung oleh penelitian yang relevan, tetapi belum ada pembuktian secara empiris (faktual) maka jawaban itu

disebut hipotesis. Hipotesis yang dibuat pada penelitian ini adalah Terdapat pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Pengendalian Internal anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Bandung.

### 3.2 Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel-variabel independen Pengendalian Intern dan Partisipasi Penyusunan Anggaran serta variabel dependen Kinerja pemerintah Daerah Adapun tabel operasionalisasi sesuai dengan variabel tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**
**Operasionalisasi Variabel**

| No | Variabel | Konsep Variabel | Indikator | Skala | No Kuesioner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anggaran Berbasis Kinerja ($X_1$) | Metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efesiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja." **Abdul Halim (2010:177)** | 1. Pengukuran Kinerja | Ordinal | 1-2 |
| | | | 2. Penghargaan dan Hukuman | | 3-4 |
| | | | 3. Kontrol Eksternal dan Internal | | 5-6 |
| | | | 4. Pertanggungjawaban Manajemen | | 7 |
| | | | **Abdul Halim (2012:182)** | | |
| 2 | Pengendalian Intern ($X_2$) | Pengendalian intern merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi, Pengendalian Intern juga terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi-misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja. **Rahmadi Murwanto (2012:195)** | 1. Lingkungan Control *(control environment)* | Ordinal | 8-9 |
| | | | 2. Penaksiran Risiko *(Risk Assessment)* | | 10 |
| | | | 3. Aktivitas Pengendalian *(Control activities)* | | 11 |
| | | | 4. Informasi dan Komunikasi *(informasi and Communication*) | | 12 |
| | | | 5. Pemantauan *(Monitoring)* | | 13-14 |
| | | | **Rahmadi Murwanto (2012:195)** | | |
| 3 | Kinerja Pemerintah Daerah (Y) | Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program | 1. Masukan (Input) | Ordinal | 15-16 |
| | | | 2. Proses (Process) | | 17-18 |
| | | | 3. Keluaran (Output) | | 19 |
| | | | 4. Hasil (Outcomes) | | 20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan, perencanaan strategis (strategic, planning) suatu organisasi.<br><br>**(Mohamad Mahsun (2013:25)).** | 5. Manfaat (Benefit)<br><br>6. Dampak (Impact)<br><br>**(Mohamad Mahsun (2013:25)).** | | 21<br>22-23 |

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan guna mendapatkan data untuk penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Field Reseach (Penelitian Secara Langsung)
   a. Observasi, peneliti terlebih dahulu menentukan tempat penelitian dan melakukan survey terhadap tempat dalam hal penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah.
   b. Kuesioner, teknik kuesioner yang peneliti gunakan adalah kuesioner tertutup. Suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas, Sub. Bagian keuangan, Sub. Bagian akuntansi Dengan harapan mereka bisa memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.
   c. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung kepada pegawai SKPD Kota Cimahi mengenai Anggaran Berbasis Kinerja dan Pengendalian Internal, dan kinerja pemerintah daerah
2. Library Reseach (Studi Pustaka)

   Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku, jurnal, artikel, peraturan perundang – undangan , website dan penelitian – penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti.

### 3.4 Teknik Penarikan Sampel

#### 3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2014:80), mengemukakan pengertian populasi sebagai berikut: Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Dinas Kota Bandung. Unit observasi dalam penelitian ini adalah Kepala dinas 17orang , Sub. Bagian Program dan Anggaran 34 orang dan Bidang Pengendalian 17 orang.

#### 3.4.2 Sampel

Menurut Umi Narimawati (2010:38) adalah sebagai berikut Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian". Dalam penelitian ini penulis melakukan penarikan sampel dengan menggunakan teknik sampling jenuh.

Menurut Sugiyono (2011:126) mengatakan bahwa Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi yang digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil".

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah seluruh dari populasi yaitu Kepala dinas 17orang , Sub. Bagian Program dan Anggaran 34 orang dan Bidang Pengendalian 17 orang.

### 3.5 Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan mengenai populasi yang perlu diuji kebenarannya. Untuk melakukan pengujian dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi, cara ini telah mudah dibandingkan dengan menghitung seluruh anggota populasi. Setelah mendapatkan hasil statistik dari sampel, maka hasil tersebut dapat digunakan untuk menguji pernyataan populasi, apakah bukti empiris dari sampel mendukung atau menolak pernyataan mengenai populasi. Seluruh proses tersebut dikenal dengan pengujian hipotesis.

Menurut Suharyadi dan Purwanto S.K (2009:112) pengujian hipotesis didefinisikan sebagai berikut:

> "Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karenanya harus ditolak".

Terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini. Kedua hipotesis ini diuji dengan statistik uji t dengan ketentuan $H_0$ ditolak jika $t_{hitung}$ lebih besar dari nilai kritis untuk α = 0,05 sebesar 1,999.

**1) Hipotesis 1**

Hipotesis pertama adalah Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Persamaan model struktural:

$$\eta = \beta \xi_{1} + \zeta$$

Model pengukuran dan struktural terdiri dari 1 *exogenous constructs* dengan 5 indikator dan 1 *endogenous constructs* dengan 6 indikator. Model struktural yang akan diuji digambarkan sebagai berikut:

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan dengan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_o$ : β = 0 : Pengaruh $\xi_1$ terhadap η tidak signifikan

$H_1$ : β ≠ 0 : Pengaruh $\xi_1$ terhadap η signifikan

Statistik uji yang digunakan adalah:

$$t = \frac{\beta}{SE(\beta)}$$

Tolak $H_o$ jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan. Dimana $t_{tabel}$ untuk α = 0,05 sebesar 1,999.

**2) Hipotesis 2**

Hipotesis kedua adalah Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Persamaan model struktural:

$$\eta = \gamma \xi_{2} + \zeta$$

Model pengukuran dan struktural terdiri dari 1 *exogenous constructs* dengan 3 indikator dan 1 *endogenous constructs* dengan 6 indikator

Untuk menguji hipotesis kedua dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_o$ : γ = 0 : Pengaruh $\xi_2$ terhadap η tidak signifikan

$H_1$ : γ ≠ 0 : Pengaruh $\xi_2$ terhadap η signifikan

Statistik uji yang digunakan adalah:

$$t = \frac{\lambda}{SE(\lambda)}$$

Tolak $H_o$ jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan. Dimana $t_{tabel}$ untuk α = 0,05 sebesar 1,999.

**3) Menggambarkan Daerah Penerimaan dan Penolakan**

Untuk menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan terhadap sebuah hipotesis dapat digambarkan dengan uji dua pihak daerah penerimaan dan penolakan hipotesis.




Sumber : Sugiyono dalam Umi Narimawati (2010:54)

**Gambar 3.2**
**Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis**

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Anggaran Berbasis Kinerja

Berdasarkan Persentase Skor Jawaban Responden memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel pengendalian intern sebesar 79%, menurut tabel 3.8 angka tersebut termasuk kategori Baik karena berada pada interval 68,01 % - 84,00 %. Besaran ini tidak mencapai 100% dan memiliki gap yaitu sebesar 21%. Gap sebesar 29% ini menunjukan penyebab Anggaran Berbasis Kinerja ($X_1$) pada SKPD Kota Cimahi belum mencapai tingkat ideal.

### 4.2 Partisipasi Penyusunan Anggaran

Berdasarkan Persentase Skor Jawaban Responden memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel partisipasi penyusunan anggaran sebesar 65%, menurut tabel 3.8 angka tersebur termasuk kategori Cukup Baik karena berada pada interval 52,01 % - 68,00 %. Besaran ini tidak mencapai 100% dan memiliki gap yaitu sebesar 35%. Gap sebesar 35% ini menunjukan penyebab Pengendalian Internal ($X_2$) pada SKPD Kota Cimahi belum mencapai tingkat ideal.

### 4.3 Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan Persentase Skor Jawaban Responden memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel kinerja pemerintah daerah sebesar 82%, menurut tabel 3.9 angka tersebut termasuk kategori Baik karena berada pada interval 68,01 % - 84,00 %. Besaran ini tidak mencapai 100% dan memiliki gap sebesar 18%. Gap sebesar 18% ini menunjukan penyebab Kinerja SKPD Kota Cimahi belum mencapai tingkat ideal.

### 4.4 Analisis Verifikatif

**1. Keterkaitan Anggaran Berbasis Kinerja dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Nilai koefisien korelasi menunjukan keeratan hubungan antara variabel laten *eksogen* dengan variabel laten *endogen*. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *software SmartPLS* v.3.2.4, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.1**
**Koefisien Korelasi**

| Variabel Laten | Korelasi | $t_{hitung}$ |
|---|---|---|
| Anggaran berbasis Kinerja ($X_1$) > Kinerja Pemerintah Daerah (Y) | 0.488 | 0.926 |
| Pengendalian Intern ($X_2$) > Kinerja Pemerintah Daerah (Y) | 0.511 | 0.999 |

Sumber: Data diolah menggunakan *SmartPLS* v.3.2.4

a) Nilai koefisien korelasi yang diperoleh untuk variabel Anggaran Berbasis Kinerja ($X_1$) dengan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 0.488, berdasarkan pada tabel 3.10, angka tersebut termasuk dalam kategori *Moderate correlation/Substantial relationship/*Cukup Baik karena berada pada interval 0.40-0.69. nilai koefisien korelasi bertanda positif yang menandakan hubungan yang searah, artinya jika Anggaran Berbasis Kinerja dilakukan dengan Cukup Baik maka akan berdampak pada semakin baik pula terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
b) Nilai koefisien korelasi yang diperoleh untuk variabel Pengendalian Internal ($X_2$) dengan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 0.511, berdasarkan pada tabel 3.10, angka tersebut termasuk dalam kategori *Moderate correlation/Substantial relationship/*Cukup Baik karena berada pada interval 0.40-0.69. nilai koefisien korelasi bertanda positif yang menandakan hubungan yang searah, artinya jika semakin baiknya penerapan Pengendalian Internal maka akan berdampak pada semakin baik pula terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

**2. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Koefisien determinasi merupakan angka yang menunjukan sebesar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan perangkat lunak bantuan SmartPLS v.3.2.4, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.2**
**Koefisien Determinasi**

| Variabel Laten | $R_{square}$ |
|---|---|
| Anggaran Berbasis Kinerja ($X_1$) > Kinerja Pemerintah Daerah (Y) | 0.373 |
| Pengendalian Internal ($X_2$) > Kinerja Pemerintah Daerah (Y) | |

Sumber: Data diolah menggunakan *SmartPLS* v.3.2.4

Pada tabel 4.2 di atas, terlihat nilai $R_{Square}$ yang diperoleh adalah sebesar 0,373 atau 37.3%. Hasil tersebut menunjukan bahwa Penerapan Anggaran Berbasais Kinerja ($X_1$) dan Pengendalian Internal ($X_2$) secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 37.3% terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y), sedangkan sebanyak (1-$R_{Square}$) 62.7% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Berdasarkan kriteria penilaian koefisien determinasi pada tabel 3.11, termasuk kriteria yang sedang/Cukup Baik karena berada pada interval $0.16 \leq R^2 < 0.49$. Untuk mengetahui besar kontribusi pengaruh dari setiap variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**
**Kontribusi Pengaruh Variabel Laten *Eksogen* terhadap Variabel Laten *Endogen***

| Variabel Laten | Koefisien Jalur | Pengaruh Langsung | Pengaruh Tidak Langsung | | Total Pengaruh |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | $X_1$ | $X_2$ | |
| Anggaran Berbasis Kinerja ($X_1$) > Kinerja Pemerintah Daerah (Y) | 0.355 | $0.355^2$=13% | | 4.65 | 17.65% |
| Pengendalian Internal ($X_2$) > Kinerja Pemerintah Daerah (Y) | 0.390 | $0.390^2$=15% | 4.65 | | 19.65% |
| **Total** | | | | | 37.30% |

Sumber: Data diolah menggunakan *SmartPLS* v.3.2.4

Nilai-nilai yang tersaji pada tabel 4.3 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Anggaran Berbasis Kinerja memberikan pengaruh secara parsial sebesar 17.65% terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan rincian 13% pengaruh langsung dan 4.65% merupakan pengaruh tidak langsung melalui partisipasi penyusunan anggaran.
b) Pengendalian Internal memberikan pengaruh secara parsial sebesar 19.65% terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan rincian 15% pengaruh langsung dan 4.65% merupakan pengaruh tidak langsung melalui pengendalian intern.

**4.5 Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah memberikan pengaruh sebesar 17.65%, dengan tingkat keeratan korelasi yang Cukup Baik yaitu sebesar 0.488 (0.40-0.69). $t_{hitung}$ diperoleh sebesar 2.755, nilai ini lebih besar dari pada $t_{tabel}$ 1.999, sehingga dapat disimpulkan bahawa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak Ho dan menerima Ha yang berarti Anggaran Berbasis Kinerja memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja SKPD Kota Cimahi. Anggaran Berbasis Kinerja memberikan pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, maka dapat disimpulkan semakin baik Anggaran Berbasis Kinerja yang dilakukan maka akan membuat Kinerja Pemerintah Daerah semakin baik pula. Dalam penelitian ini Anggaran Berbasis Kinerja belum mencapai titik ideal atau belum mencapai target dimana masih terdapat gap sebesar 21% (100%-79%), berarti bahwa Anggaran Berbasis Kinerja belum berjalan dengan baik atau masih terdapat masalah yang terjadi dalam Anggaran Berbasis Kinerja.

   Hasil penelitian dengan arah hubungan yang positif ini juga di dukung oleh teori pada pembahasan sebelumnya yaitu Menurut Mardiasmo (2002:143) untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang sesuai dengan value for money (economy, efficiency, effective), perlu peningkatan fungsi aparat pemeriksaan fungsional pemerintah dilingkungan pemerintah daerah. Dalam bukunya Boynton (2006) menyatakan fungsi aparat pemeriksaan fungsional melaksanakan fungsi pengendalian intern (intern control) yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Lalu menurut Rahmadi Murwanto (2012:195) mengungkapkan bahwa pengendalian intern merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi. Pengendalian intern terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penlitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ira Amelia, dkk (2014) menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah kabupaten pelalawan, Semakin baik dan efektif pengendalian intern yang dilaksanakan, maka kinerja pemerintah juga akan semakin baik. Oktari (2011) dalam penelitiannya tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten Kampar, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

2. Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah memberikan pengaruh sebesar 19.65%, dengan tingkat keeratan korelasi yang Cukup Baik yaitu sebesar 0.511 (0.40-0.69). $t_{hitung}$ diperoleh sebesar 2.738, nilai ini lebih besar dari pada $t_{tabel}$ 1.999, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak Ho dan menerima Ha yang berarti Pengendalian Internal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kota Bandung. Pengendalian Internal memberikan pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, maka dapat disimpulkan semakin baik Pengendalian Internal yang dilakukan maka akan membuat Kinerja Pemerintah Daerah semakin baik pula. Dalam penelitian ini Pengendalian Internal belum mencapai titik ideal atau belum mencapai target dimana masih terdapat gap yang Cukup Baik besar yaitu sebesar 35% (100%-65%), sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Internal belum berjalan dengan baik atau masih terdapat masalah yang terjadi dalam Pengendalian Internal .

   Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dolakukan oleh Ni Luh Sri Rahayu, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Ni Kadek Sinarwati (2014) dalam penelitiannya tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintah daerah menemukan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sisca Mutiara Sari, dkk (2014) menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dianita (2009) dan Arifin (2012) yang menyebutkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, serta beberapa pengujian penelitian mengenai Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Cimahi, maka dapat di rumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pemerintah daerah pada 21 Skpd Kota Cimahi berpengaruh signifikan, besar pengaruh sebesar 17.65% dengan arah hubungan yang positif, artinya saat Anggaran Berbasis Kinerja dilakukan dengan baik, maka Kinerja Pemerintah Daerah pun akan semakin baik pula dan juga sebaliknya. Tingkat keeratan korelasinya termasuk kategori Cukup yaitu sebesar 0.488 (0.40-0.69).

Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada 21 SKPD Kota Cimahi berpengaruh signifikan, besar pengaruhnya adalah 19.65% dengan arah hubungan yang positif atau searah, artinya semakin baiknya pengendalian Internal, akan membuat kinerja pemerintah daerah pada Dinas di pemerintah kota Cimahi akan semakin baik pula dan juga sebaliknya. Tingkat keeratan korelasi termasuk dalam kategori Cukup yaitu sebesar 0.511 (0.40-0.69).

### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

#### 4.2.1Saran Praktis

Untuk meningkatkan anggaran berbasis kinerja setiap SKPD Kota Cimahi perlu melakukan pengawasan terhadap anggaran berbasis kinerja agar pada setiap penetapan APBD tidak terlambat. Penyusunan anggaran yang dibuat harus dilakukan dengan baik agar anggaran terserap dengan baik

Bagi instansi disarankan untuk meningkatkan kualitas pengendalian intern, sebaiknya dalam lingkungan control pada anggaran dan pemisahan tugas dilakukan dengan baik. Kemudian instansi juga disarankan untuk meningkatkan pemantauan. Kondisi dimana seluruh sistem pengendalian organisasi harus dimonitor untuk menilai mutu dari sistem pengendalian tersebut. Kelemahan dalam sistem pengendalian harus dilaporkan kepada manajemen tingkat atas dan harus dilakukan evaluasi

Dan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kota Cimahi perlu diadakan evaluasi kinerja pada SKPD setiap tahunnya, sehingga dapat diketahui baik atau buruknya kinerja setiap SKPD Kota Cimahi.

#### 5.2.2 Saran Akademis

Dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik diharapkanhasil ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti lain dapat menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti sistem pelaporan pada pemerintah pusat maupun daerah. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan kedepannya bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih baik lagi.

### VI Daftar Pustaka


Abdul Halim,2002, Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama , Salemba empat, Jakarta

Azwar, S. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Bastian Indra. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Salemba Empat.

Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga :Jakarta

Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Salemba Empat.

Boynton, Jhonson, Kell. 2006. Modern Auditing. Buku 1 edisi 7. Alih Bahasa Gina Gania, Ichsan Setyo Budi. Erlangga. Jakarta.

Chabib Soleh dan Suripto. 2011. Menilai Kinerja Pemerintah Daerah Jatinangor: FOKUSMEDIA

Imam Ghozali. 2006. Aplikasi Analisis Multivarite dengan SPPS. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro

Khusufi, Muhammad. 2013. Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat. Jakarta.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Mardiasmo . 2006, perpajakan , Edisi Revisi . Andi : Yogyakarta

Mahsun, Mohamad, 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Penerbit BPFE,Yogyakarta.

Mahsun . 2013 . Pengukuran Kinerja Sektor Publik . BPFE Yogyakarta : Yogya warta

Mulyadi. 2011. Auditing Buku 1. Jakarta: Salemba Empat

Prof. Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Rahmadi Murwanto. 2012. Audit Sektor Publik Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LPKPAP.

sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitaf, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfa Beta: Bandung.

Sugiyono. 2002. *Statistik Untuk Penelitian*: Alfa Beta, Bandung.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Subana, M. Dan Sudrajat. (2005). *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah.* Bandung:CV Pustaka Pelajar.

Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Suharyadi dan Purwanto S.K. 2009. Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Jilid 2. Jakarta: Salemba Empat

Umi Narimawati dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah: Paduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir*. Jakarta: Genesis.

Umi Narimawati. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi. Bandung: Agung Media.

Malayu S.P. Hasibuan. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi Cetakan Ke-8.Jakarta : PT. BumiAksara.

Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja* Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Mulyadi, 2002. *Auditing*, Edisi Keenam. Jakarta : Salemba

Mulyani, Pujianik. Rindah F.Suryawati. 2011. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 7, Nomor 2, September 2011

Nafarin, M. 2007. *Penganggaran Perusahaan*, Yogyakarta: UOO STIM YKPN.

Wawan Sukmawan dan Lia Anggarsari. (2009). Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya). Jurnal Akuntansi Vol.4 No.1 ISSN 1907-9958

Hisyamudin,Fuad(2015) *http://m.inilahkoran.com/berita/bandung/46739/serapan-anggaran-rendah-dprd-cimahi-diminta-tingkatkan-kinerja*